

ANALISIS KEBIJAKAN REDISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PERUBAHAN SOSIAL-EKONOMI: STUDI KASUS KESEJAHTERAAN DI INDONESIA

Muyassar

Afiliasi; UIN Sunan Ampel Surabaya

10020121044@uinsby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki berbagai aspek dan implikasi dari kebijakan redistribusi pendapatan dalam konteks meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan memeriksa berbagai strategi kebijakan seperti pajak progresif, program bantuan sosial, dan redistribusi sumber daya, penelitian ini menganalisis dampaknya terhadap distribusi pendapatan. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi yang komprehensif tidak hanya dapat meratakan distribusi pendapatan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek-aspek penting lainnya dalam masyarakat. Studi ini mengidentifikasi bahwa pendekatan yang terpadu antara kebijakan fiskal, program sosial, dan reformasi struktural diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dalam redistribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan redistribusi yang lebih adil dan kesejahteraan yang lebih merata.

kata kunci: *Ekonomi; Redistribusi pendapatan; Kesejahteraan*

Abstract

This research investigates the various aspects and implications of income redistribution policies in the context of improving economic welfare. By examining various policy strategies such as progressive taxation, social assistance programs, and resource redistribution, this study analyzes their impact on income distribution. The results show that a comprehensive redistribution policy can not only equalize income distribution, but also have a significant impact on other important aspects of society. This study identifies that an integrated approach between fiscal policies, social programs, and structural reforms is needed to achieve optimal results in income redistribution and overall welfare improvement. The findings provide important insights for policy makers in designing a more comprehensive and sustainable strategy to achieve the goals of fairer redistribution and more equitable welfare.

keywords: *Economy; Income redistribution; Welfare*

Copyright: © 2024. Muyassar.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Article History: Received 08 January 2024, Revised 14 June 2024, Accepted 14 June 2024, Available online 30 April 2024

Pendahuluan

Kesenjangan pendapatan, menjadi fenomena yang semakin mencolok di tengah arus globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, menjadi tantangan krusial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Di banyak negara, kesenjangan yang meluas antara kelompok-kelompok ekonomi telah memunculkan kebutuhan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan redistribusi pendapatan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan redistribusi pendapatan mencakup berbagai instrumen, mulai dari sistem pajak yang progresif hingga program kesejahteraan yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada kelompok rentan. Penerapan kebijakan ini melibatkan pertimbangan kompleks terkait efektivitas ekonomi, keadilan sosial, dan keseimbangan politik. Oleh karena itu, penelitian mendalam tentang dinamika kebijakan redistribusi pendapatan menjadi esensial untuk memahami bagaimana negara-negara dapat merespons dan mengatasi ketidaksetaraan yang semakin nyata.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, kebijakan redistribusi pendapatan juga menghadapi tantangan baru, termasuk adaptasi terhadap perubahan ekonomi global dan pertimbangan terkait ketidakpastian masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam aspek-aspek kritis kebijakan redistribusi pendapatan, mengevaluasi keberlanjutan model-model yang ada, dan menawarkan wawasan mendalam terhadap perkembangan kontemporer yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Melalui analisis yang komprehensif, kita dapat memahami peran sentral kebijakan redistribusi pendapatan dalam membentuk fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Literature review merupakan suatu kajian ilmiah yang berfokus pada satu topik tertentu. *Literature review* bertujuan untuk memberikan gambaran ilmiah mengenai perkembangan suatu topik tertentu. Menurut Rowley & Slack (2004), *literature review* akan memungkinkan seorang peneliti untuk melakukan identifikasi atas suatu teori dan metode, mengembangkan suatu teori dan metode, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara suatu teori dengan relevansi di lapangan terhadap suatu hasil penelitian.¹

Rancangan yang akan digunakan dalam *literature review* ini berdasarkan hasil pengamatan dengan eksplorasi melalui artikel atau hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut merupakan hasil karya lain yang memiliki topik penelitian serupa. Penelitian pertama ditulis oleh Ardi Lestianto dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Perpajakan dan Jaminan Sosial Pemerintah Terhadap Redistribusi Pendapatan Di Indonesia Periode Tahun 1985-2002” (2004). Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis terkiat penetapan tarif pajak yang progresif (PPh) dan kebijakan jaminan sosial pemerintah berupa pengalokasian dana pengeluaran pemerintah untuk program-program yang memiliki tujuan dan pengaruh terhadap redistribusi pendapatan di Indonesia Tahun 1985-2002. Temuan yang ditemukan peneliti adalah penetapan pajak yang bersifat progresif, kebijakan jaminan sosial pemerintah berupa pengalokasian dana pengeluaran pemerintah untuk program subsidi beras dan pupuk, pendidikan, serta kesehatan dan nutrisi memiliki pengaruh terhadap redistribusi pendapatan di Indonesia.

Penelitian kedua ditulis oleh Nur Farida Liyana, Gusti Ayu Indah Ratnasari, dan Eko Susanto dengan judul “Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Pembangunan Daerah Di Indonesia” (2022). Peneliti menganalisis mengenai pengaruh DBH Pajak terhadap IPM yang mana data tersebut diambil oleh peneliti dari 34 provinsi selama lima tahun yaitu 2017-

¹ Eko Agus, Sutomo, Aris Hartono. “LITERATUR REVIEW; PANDUAN PENULISAN DAN PENYUSUNAN.” *Jurnal Keperawatan*. (2019): Hlm.2

2021. Hasil temuan yang diperoleh adalah fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan dapat meningkatkan pembangunan manusia Indonesia. Sehingga memang benar dana pajak yang kembali ke daerah digunakan untuk melakukan belanja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia yaitu utamanya pendidikan, kesehatan yang merupakan indikator utama untuk menghitung IPM.²

Penelitian ketiga ditulis oleh Cindy dengan judul “Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia” (2023). Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Temuan dari penelitian ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perpajakan serta lemahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang perpajakan. Maka dari itu, peneliti memberikan saran dengan pengadaan sosialisasi serta edukasi melalui media sosial ataupun seminar secara berkala. Selain itu, perlunya ada penguatan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan guna memberikan efek jera dan menjunjung nilai keadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi serta memahami gejala sentral dengan memanfaatkan informasi berupa kata atau teks. Teknik pengambilan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Adapun sumber dari studi kepustakaan yang digunakan oleh peneliti adalah buku, artikel, jurnal, dan skripsi yang memiliki topik sama dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen yang relevan dari objek yang diteliti untuk membantu keberlangsungan penelitian.

Pembahasan

Redistribusi pendapatan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendistribusikan pendapatan milik masyarakat ber-

² Nur Farida Liyana, Gusti Ayu Indah Ratnasari, dan Eko Susanto. “Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Pembangunan Daerah Di Indonesia.” Tangerang. *BALANCE VOCATION ACCOUNTING JOURNAL* E-ISSN: 2580-1074, (2022): Hlm.119.

kecukupan untuk kurang mampu. Alasan dilakukannya kebijakan redistribusi pendapatan adalah demi mengatasi permasalahan terkait kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Secara garis besar, redistribusi pendapatan dapat di artikan sebagai upaya untuk pendistribusian kembali pendapatan yang di terima di Masyarakat dari kalangan mampu kepada Masyarakat lainnya yang berasal dari kalangan kurang mampu, sehingga redistribusi ini terbagi menjadi 2 macam yaitu redistribusi horizontal dan redistribusi vertical.

Redistribusi pendapatan horizontal lebih mengaju pada bentuk penyaluran uang antar kelompok maupun pribadi. Dengan kata lain peredistribusian ini sifatnya dalam lingkungan kecil atau ruang lingkup yang lebih kecil. Adapun fungsinya redistribusi horizontal ini, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat lainnya dari golongan ekonomi lemah sehingga memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, Redistribusi pendapatan vertical merujuk pada penyaluran uang dari golongan Masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Masyarakat dari kalangan ekonomi kuat kepada Masyarakat ekonomi lemah. Tujuan Redistribusi menurut Ramlan Surbakti dalam buku memahami ilmu politik:1992, dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaannya adalah Memberikan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk serta mengurangi adanya kesenjangan pendapatan yang terjadi di dalam kehidupan Masyarakat. Selain itu, redistribusi pendapat juga bermanfaat untuk mengurangi kondisi perekonomian Masyarakat yang kurang merata sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara umum.

Tingkat pendapatan sering menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Namun, meningkatnya pendapatan belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat karena perbedaan dalam tingkat pendapatan antarindividu. Sumber pendapatan yang didapat bukan hanya akibat peran pemerintah namun ada peran pihak ketiga dalam hal ini para pelaku usaha atau perusahaan yang bisa menjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat.

Adam Smith berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan mendorong kelompok berpenghasilan tinggi untuk berinvestasi. Hal ini akan menstimulasi akumulasi kapital dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Perhatian pemerintah terhadap ketimpangan sangat diperlukan, karena ketimpangan wilayah yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, menambah jumlah kemiskinan dan pengalokasian asset yang tidak efisien.

Menurut Muhammad Rapii, M.Pd.,dkk, dalam bukunya yang berjudul "Perekonomian Indonesia" menjelaskan bahwa redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakatnya. Perlindungan ini bukan hanya pengeluaran anggaran publik yang tidak berguna, melainkan sebuah investasi sosial yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan cara meredistribusi pendapatan.

Program redistribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah yaitu penarikan pajak. Artinya, sebagian dari pendapatan masyarakat akan dimobilisasi oleh negara untuk digunakan dalam membiayai pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua orang, bukan hanya dirasakan oleh para pembayar pajak saja. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang didalam UU tersebut menjelaskan bahwa UU HPP dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Kebijakan redistribusi pajak memiliki dampak yang beragam terhadap kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dikenakan pada golongan yang lebih tinggi kemudian didistribusikan kepada golongan yang lebih rendah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu,

dana yang didapat dari kebijakan pajak tersebut bisa dialokasikan untuk program-program sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau bantuan sosial lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat. Namun dampak kebijakan redistribusi pajak terhadap kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada implementasi yang tepat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus dari pemerintah karena memiliki peran penting dalam perekonomian global dan lokal. UMKM muncul atas respons terhadap berbagai permasalahan ekonomi, dan sosial. Selain itu UMKM menjadi alternatif untuk menciptakan lapangan kerja dan mandiri secara ekonomi. Namun, masyarakat mengalami kesulitan, terutama dalam aspek modal dan keuangan saat membangun UMKM.

Program Dana Penguatan Modal menjadi solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Program DPM merupakan sumber pendanaan yang diberikan kepada masyarakat sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya program Dana Penguatan Modal dari pemerintah, permasalahan dasar yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memperoleh sumber modal dapat terselesaikan.

Pengentasan kemiskinan tetaplah menjadi salah satu program prioritas dan strategi lintas bidang di Indonesia saat ini. Pemerintah mempunyai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang salah satu program tersebut bernama "Program Keluarga Harapan (PKH)". program ini didesain bukan hanya untuk memastikan standar hidup keluarga rumah tangga sangat miskin tetap terjaga ketika berhadapan dengan economic shock, tapi juga diharapkan memberikan ruang lebih leluasa bagi peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Bantuan dana tunai PKH sendiri diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) yang biasa disebut pengurus keluarga karena diyakini dapat mendorong efektifitas PKH dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.

Pemerintah berharap masyarakat merasakan dampak dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). bantuan tunai PKH

diharapkan bukan hanya memberikan perbaikan standar hidup secara ekonomi, namun juga secara sosial. PKH membantu keluarga miskin agar anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan yang lebih baik dengan memberikan bantuan pendidikan secara finansial, seperti bantuan biaya sekolah, buku, seragam, dan alat tulis. Selain itu, program ini juga berupaya meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan. Bantuan diberikan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis, akses ke program imunisasi, serta pengelolaan gizi dan kesehatan ibu hamil. Secara keseluruhan, PKH telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga miskin di Indonesia.

Kebijakan redistribusi pendapatan melalui jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah akan menghasilkan perubahan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan kebijakan lainnya. Akan tetapi, signifikansi dari kebijakan ini tergolong lebih rendah dikarenakan dalam pelaksanaannya memerlukan kecermatan dan ketepatan dalam pengalokasian dana agar redistribusi tersebut dapat maksimal.³ Bahkan, tidak menurup kemungkinan bahwa pengalokasian dana yang seharusnya tersampaikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga ikut dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Maka dari itu, kebijakan redistribusi pendapatan dalam jaminan sosial dinilai tidak lebih dominan apabila dibandingkan dengan variabel redistribusi pendapatan lainnya.

Dengan hadirnya kebijakan redistribusi pendapatan di Indonesia, tentu saja tidak selalu berjalan dengan mulus. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi pendapatan yaitu sistem pajak tidak efisien yang lebih memberatkan pada individu yang berpendapatan rendah daripada individu yang memiliki pendapatan tinggi. Selain itu, maraknya tindak pidana korupsi yang menghambat proses redistribusi pendapatan di

³ Ardi Lestianto. "Analisis Pengaruh Kebijakan Perpajakan dan Jaminan Sosial Pemerintah Terhadap Redistribusi Pendapatan Di Indonesia Periode Tahun 1985-2002." Surabaya. Perpustakaan Universitas Airlangga. Hlm.96.

Indonesia. Apabila sumber daya yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung masyarakat disalahgunakan maka kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia akan semakin menjadi-jadi.

Maka dari itu, terdapat rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk kedepannya. Dalam menghadapi sistem pajak tidak efisien, terdapat rekomendasi kebijakan reformasi pajak yang meliputi kajian kembali terkait struktur pajak guna memastikan bahwa beban pajak yang diberikan tersebut adil dan tidak memberatkan sebelah pihak. Selain itu, dalam reformasi pajak dapat dilakukan peningkatan efektivitas pengumpulan pajak guna mengurangi ruang bagi praktik penghindaran pajak. Sedangkan dalam menghadapi tantangan korupsi, dapat dilakukan dengan meningkatkan kebijakan serta langkah-langkah seperti transparansi dalam pengelolaan anggaran publik dan proses pengadaan sehingga keluar masuknya dana tersebut dapat lebih jelas dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan redistribusi pendapatan memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Berbagai strategi yang melibatkan perpajakan progresif, program bantuan sosial, dan redistribusi sumber daya telah terbukti memberikan kontribusi dalam meratakan distribusi pendapatan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada konteks ekonomi dan implementasi yang tepat. Implementasi kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal akan menjadi kunci utama dalam merancang strategi redistribusi pendapatan yang berhasil. Pentingnya pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam perancangan kebijakan redistribusi menjadi krusial untuk mencapai tujuan kesetaraan pendapatan yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Eko Agus, Sutomo, Aris Hartono. "LITERATUR REVIEW ; PANDUAN PENULISAN DAN PENYUSUNAN." *Jurnal Keperawatan*. (2019).
- Ardi Lestianto. "Analisis Pengaruh Kebijakan Perpajakan dan Jaminan Sosial Pemerintah Terhadap Redistribusi Pendapatan Di Indonesia Periode Tahun 1985-2002." Universitas Airlangga. 2004.
- Nur Farida Liyana, Gusti Ayu Indah Ratnasari, Eko Susanto. "Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Pembangunan Daerah Di Indonesia." *Balance Vocation Accounting Journal*. (2022).
- DAN, M. S. T. S. "Studi Komparatif Distribusi Pendapatan Masyarakat Sekitar Tambang Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Program Corporate Social Responsibility Di Kabupaten Berau." *Jurnal EKSEKUTIF*. Volume, 10(2), (2013).
- Nusiantari, D., & Swasito, A. P. "Peran Penerimaan Pajak Dalam Usaha Pemerataan Pendapatan." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(1), (2019).
- Arianty, F. "Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 5(1), (2022): 1.
- Fahmi, A. "Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan PBB Terhadap Kesenjangan Pendapatan." *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 6(1), (2019): 39-54.
- Nadiya, S. A. N. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM DANA PENGUATAN MODAL (DPM) BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) BINAAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SLEMAN." (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga). 2019.
- PKH, A. G. T. I. "Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang Lebih Bermakna"